

ALASAN PENARIKAN PASUKAN PERANCIS DARI OPERASI BARKHANE DI AFRIKA 2021

Wafiq Halidsyam¹, Sonny Sudiar²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

Abstrak

Penelitian ini mengkaji latar belakang dan implikasi penarikan diri Prancis dari operasi militer Barkhane di Afrika, dengan fokus pada perkembangan yang terjadi antara tahun 2020 hingga 2021. Dengan menggunakan metodologi kualitatif dan data sekunder, penelitian ini menerapkan teori pengambilan keputusan Richard Snyder untuk menganalisis bagaimana ketidakstabilan regional dan melonjaknya sentimen anti-Prancis—yang dipicu oleh serangkaian kudeta—melemahkan pengaruh Prancis di kawasan tersebut. Munculnya tentara bayaran Grup Wagner dan Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok semakin memperburuk situasi, sehingga menantang status Prancis sebagai pemain kunci dalam upaya kontra-terorisme di Sahel. Menanggapi ancaman eksistensial di sektor militer, politik, ekonomi, dan sosial ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan penarikan strategis pasukan dan pengurangan kehadiran militer, dengan menggambarkan penarikan tersebut sebagai langkah yang diperlukan demi keamanan nasional.

Kata Kunci: Perancis, Afrika, Wagner, China, kontraterorisme

Abstract

This study examines the circumstances and implications of France's withdrawal from the Barkhane military operation in Africa, focusing on developments from 2020 to 2021. Utilizing a qualitative methodology and secondary data, it applies Richard Snyder's decision-making theory to analyze how regional instability and a surge of anti-French sentiment, fueled by multiple coups, undermined France's influence in the region. The rise of Wagner Group mercenaries and China's Belt and Road Initiative further exacerbated the situation, challenging France's status as a key player in counterterrorism efforts in the Sahel. In response to these existential threats across military, political, economic, and social sectors, French President Emmanuel Macron announced a strategic withdrawal of troops and a reduction in military presence, framing the departure as a necessary measure for national security.

Keyword: France, Africa, Wagner, China, Counterterrorism

1. PENDAHULUAN

Ketika sebagian besar koloni Afrika-nya memperoleh kemerdekaan Prancis telah melakukan berbagai operasi militer sebagai wujud intervensi yang dilakukannya atas respon masalah-masalah domestik dari negara-negara bekas jajahnya., Prancis telah meluncurkan lebih dari lima puluh intervensi militer di benua tersebut (Powell, 2016).

Saat ini, Prancis memiliki lebih dari 3.000 tentara yang tersebar di lima negara di Afrika, yakni Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger dan Chad. Beberapa intervensi militer seperti Operasi Épervier di Chad, Operasi Serval di Mali, dan Operasi Barkhane di Mali, dilakukan oleh Prancis atas respon terhadap ancaman serius terorisme di wilayah Sahel. pada 12 Januari 2013, ratusan tentara Prancis telah terlibat dalam konflik di Mali. Sekitar

4.000 orang pasukan Prancis didukung oleh 2.000 pasukan Chad dalam koordinasi dengan tentara Mali. Operasi ini menuai kesuksesan diukur dari terbunuhnya tiga dari lima pemimpin kelompok Islam militan dan kelompok Islam militant mengalami kekalahan baik dari kota maupun pegunungan Adrar (Bergamaschi, 2013).

Sahel, Arab Sāhil, Merupakan sebutan bagi wilayah semi-kering di barat dan utara-tengah Afrika yang membentang dari Senegal ke timur hingga Sudan. Ini membentuk zona transisi antara Sahara (gurun) gersang di utara dan sabuk sabana lembab di selatan. Sahel membentang dari Samudra Atlantik ke timur melalui Senegal utara, Mauritania selatan, tikungan besar Sungai Niger di Mali, Burkina Faso (sebelumnya Volta Atas), Niger selatan, Nigeria timur laut, Chad selatan-tengah, dan ke Sudan. Dengan hamparan luas gurun yang tidak ramah dan perbatasan yang longgar, Sahel telah menjadi tempat berburu bagi kelompok bersenjata, pemberontak, jihadis, dan kelompok teroris. Kekerasan jihadis meletus setelah pemberontakan di Mali Utara pada tahun 2012.

Konflik menyebar di negara Mali dan kemudian ke negara tetangga Burkina Faso dan Niger, merenggut ribuan nyawa dan membuat ratusan ribu orang mengungsi. Beberapa operasi militer anti-jihadis telah diluncurkan di daerah tersebut, termasuk operasi Perancis Barkhane dan pasukan G5 Sahel, yang mencakup unit-unit dari tentara dari lima negara. Salah satu titik paling berdarah adalah apa yang disebut "daerah tiga perbatasan" tempat pertemuan perbatasan Niger, Mali, dan Burkina.

Operasi Barkhane merupakan operasi anti-pemberontak yang dimulai pada 01 Agustus 2014. Prancis melakukan Operasi Barkhane sebagai respon atas permintaan dari pemerintah Mali dan keluarnya Resolusi DK PBB 2085 (BBC News Indonesia, 2021) untuk memastikan legalitas melalui kerangka kerja PBB agar sesuai dengan interpretasi Resolusi PBB 2085 (Charbonneau, 2019).

Operasi Barkhane memiliki misi untuk menjadi pilar kontraterorisme Prancis di wilayah Sahel. Kantor pusatnya berada di N'Djamena, dan terdiri dari 3000-3500 tentara, 200 kendaraan lapis baja, 6 pesawat tempur, 3 pesawat tak berawak, dan berbagai peralatan transportasi. Misi Barkhane adalah untuk membantu negara-negara Sahel dalam perang melawan terorisme dan untuk menghentikan kelompok-kelompok teroris dari membangun kembali tempat-tempat perlindungan mereka di wilayah tersebut. Operasi Barkhane adalah 'regionalisasi' terhadap terorisme di Sahel (Bacchi, 2022).

Prancis mempertahankan intervensi militernya di Mali berdasarkan beberapa faktor yang di dalamnya terdapat kepentingan nasional Prancis sebagai rational actor, di antaranya faktor sejarah, internal, dan eksternal. Masing-masing faktor memiliki kepentingan nasional Prancis untuk terus menunjukkan eksistensi pengaruhnya di Mali serta negara-negara sub-sahara Afrika. Faktor sejarah berkaitan erat dengan riwayat keterlibatan Prancis dengan negara bekas koloninya, hubungan ini disebut *Françafrique* dan *dette de sang*. Faktor internal meliputi stabilitas politik demi keberlangsungan keuntungan ekonomi Prancis di Mali, bahasa dan budaya, dan yang paling penting yakni keamanan dalam negeri.

Faktor terakhir merupakan faktor eksternal berkaitan erat dengan respon Prancis atas resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bentuk dari pelaksanaan Prancis

terhadap tanggung jawab utamanya dalam DK PBB, permintaan bantuan dari pemerintahan Mali, eksistensi global, dan memerangi terror.

Tujuan barkhane adalah untuk “mendukung angkatan bersenjata negara-negara mitra dalam perjuangan mereka melawan kelompok teroris” dan berkontribusi untuk mencegah kemunculan kembali tempat perlindungan teroris di kawasan (Powell, 2017). Kehadiran militer Prancis yang meningkat di Sahel selama beberapa tahun terakhir juga menandai perubahan dalam kebijakan luar negeri Prancis.

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, penelitian mengetengahkan rumusan masalah sebagai berikut Mengapa Prancis menarik pasukannya dari Operasi Barkhane di Afrika pada tahun 2021?

Tujuan penulis meneliti rumusan masalah di atas adalah untuk menjelaskan argument serta alasan pemerintah Prancis menarik pasukannya dari Operasi Barkhane di Sahel Afrika pada tahun 2021.

2. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan serta menguji teori guna menjawab pertanyaan rumusan masalah mengapa Prancis menarik pasukannya dari operasi barkhane di Afrika tahun 2021?

Fokus penelitian penulis yakni terkait alasan Prancis menarik dari dari operasi Barkhane di tahun 2021. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang mana penelitian ini bersifat tidak langsung atau dalam mengumpulkan datanya tidak langsung ke sumbernya melainkan melalui berbagai studi literatur online yang memiliki kesesuaian dengan penelitian penulis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sehingga data sekunder akan diperoleh melalui metode telaah pustaka (library research) dari berbagai sumber, seperti; buku, jurnal cetak, jurnal online, majalah, surat kabar. Sejalan dengan hal itu maka data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selain itu, berbagai data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak hanya berasal dari buku saja, melainkan juga berbagai sumber lainnya seperti jurnal, berita, artikel. Serta dalam memperoleh berbagai data baik dari media cetak maupun elektronik yang dinilai relevan dan memiliki korelasi dengan penelitian penulis.

3. PEMBAHASAN

Gambaran Umum

negara Barat sebagai kawasan berisiko tinggi. Pada akhirnya, penarikan pasukan Prancis berlangsung sepanjang tahun 2022, dan pada 9 November 2023, Macron secara resmi

mengumumkan bahwa Operasi Barkhane telah sepenuhnya selesai.

4.3 Pendekatan Pengambilan Keputusan Model Snyder

Richard C. Snyder dan rekan-rekannya mempelajari pendekatan ini dalam bidang politik internasional. Richard Snyder dan rekan-rekannya mempresentasikannya dalam buku "American Foreign Policy Formulation: Principles and Programmes" yang diterbitkan pada tahun 1954 dan dalam buku lain "Decision-making as an Approach to the study of International Politics", yang diterbitkan pada tahun 1953. Draf awal yang menjelaskan pendekatan ini diedarkan oleh Snyder kepada rekan-rekannya di Universitas Princeton pada Juni 1954. Snyder mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai suatu proses yang menghasilkan pemilihan dari sejumlah terbatas proyek alternatif yang bermasalah yang ditentukan secara sosial (yaitu, arah tindakan) dari satu proyek untuk mewujudkan keadaan tertentu yang dibayangkan oleh para pengambil keputusan (Snyder et al., 1954).

Snyder membedakan antara "analisis statis" yang digunakan oleh kaum struktural-fungsionalis dalam studi politik dan "analisis dinamis" yang hanya dimungkinkan melalui pendekatan pengambilan keputusan. Snyder mengatakan bahwa pendekatan pengambilan keputusan yang didasarkan pada "analisis proses" mampu menangani "situasi dinamis"

Snyder memulai analisisnya dengan gagasan sederhana bahwa (a) semua tindakan politik dilakukan oleh manusia konkret, dan (b) bahwa, jika kita ingin memahami dinamika tindakan ini, kita harus bersedia melihat dunia bukan dari sudut pandang kita sendiri tetapi dari perspektif orang-orang yang bertanggung jawab mengambil keputusan. Mengutip S. P. Verma: "Pengambilan keputusan terletak di jantung semua tindakan politik dan, oleh karena itu, hal itu sendiri memberikan fokus bersama di mana kita dapat menyatukan para aktor politik, situasi, dan proses untuk tujuan analisis (Snyder et al., 1954).

Snyder membagi faktor-faktor yang memengaruhi pengambil keputusan menjadi tiga, yaitu (a) lingkungan internal, (b) lingkungan eksternal, dan (c) proses pengambilan keputusan. "Lingkungan internal" adalah masyarakat tempat para pejabat membuat keputusan. Ini mencakup selain opini publik, organisasi-organisasi umum utama, karakteristik utama organisasi sosial, struktur dan fungsi kelompok, pola kelembagaan utama, proses sosial dasar, pola nilai masyarakat, serta diferensiasi dan spesialisasi sosial. "Lingkungan eksternal" terdiri dari tindakan dan reaksi negara lain serta masyarakat yang menjadi sasaran keputusan para pengambil keputusan, serta dunia fisik. Kemudian terdapat "proses pengambilan keputusan" yang terdiri dari tiga sub-kategori utama yaitu (a) lingkup kewenangan, (b) komunikasi dan informasi, dan (c) motivasi. Ini mencakup peran, norma dalam pemerintahan secara umum dan unit tertentu yang membuat keputusan. Dengan

demikian, model Snyder mencakup ketiga proses tersebut—sosial, politik, dan psikologis (Snyder et al., 1954).

4.1 Analisis Penarikan Pasukan Prancis dari Operasi Barkhane

4.1.1 Internal Factor

A. Pasca-gejolak 2020

Periode pasca-2020 menandai titik balik bagi kehadiran militer Prancis di Sahel. Serangkaian kudeta militer di Mali, Chad, Burkina Faso, dan Niger secara dramatis mengubah peran Prancis. Pada Agustus 2020, presiden terpilih Mali digulingkan, yang memulai kemunduran Mali dari kemitraan keamanan dengan Prancis. Kudeta kedua di Bamako pada Mei 2021 membawa Kolonel Assimi Goïta ke tampuk kekuasaan dan semakin merusak hubungan. Prancis, yang telah menekan junta agar segera kembali ke pemerintahan sipil, justru mendapati dirinya berseberangan dengan para pemimpin baru Mali (Coleman, J., 2020).

Ketegangan mencapai puncaknya ketika rezim Mali mengundang kontraktor militer swasta Rusia (Kelompok Wagner) sebagai mitra baru. Di tengah keretakan ini dan menghadapi kekerasan jihadis yang terus

berlanjut tanpa tanda-tanda mereda—Presiden Emmanuel Macron mengumumkan penarikan besar-besaran pasukan. Ia menyatakan berakhirnya Operasi ‘Barkhane’ sebagai operasi “eksternal” pada pertengahan 2021, yang menandai “transformasi mendalam” kehadiran Prancis di Sahel (Coleman, J., 2020).

Pola serupa segera terjadi di negara tetangga. Di Burkina Faso, kudeta pada Januari 2022 membawa junta militer ke tampuk kekuasaan, diikuti kudeta kedua pada Oktober 2022 yang mengangkat Kapten Ibrahim Traoré. Awalnya, unit pasukan khusus Prancis yang beranggotakan 400 orang (Operasi ‘Sabre’) tetap beroperasi dari Ouagadougou untuk melawan kelompok jihad yang meluas dari Mali (Repetowicz, 2023).

Pergeseran Motivasi

Penyesuaian terhadap posisi Prancis sudah terlihat sejak Januari 2020, pada kesempatan KTT Sahel di Pau, Macron mengguncang situasi yang tidak dapat dipertahankan dengan menyampaikan secara terbuka dua pengakuan yang tidak terduga. Pertama, bahwa pemerintah dan sebagian masyarakat di Sahel memiliki, paling baik, sikap yang ambigu terhadap Prancis, dan pada tingkat yang lebih rendah terhadap intervensi internasional. Kedua, bahwa tren politik dan keamanan di Sahel bergerak ke arah yang salah, meskipun ada intervensi internasional. Dengan kata lain, Paris telah mengakui relatif tidak efektifnya intervensi serta rapuhnya legitimasi lokalnya. Setidaknya dalam hal militer, Prancis mungkin telah mencapai hasil terbaik yang mungkin dicapai. Keberhasilan yang terlihat pada tahun 2020 dapat memberikan kesempatan untuk mulai melakukan penarikan diri dengan kepala tegak.

Biaya Operasional Tinggi

Salah satu faktor adalah biaya. Barkhane merupakan beban strategis. Meskipun operasi tersebut menghasilkan pengalaman dan pelajaran yang berharga, ancaman serta medan operasi lain yang baru muncul dalam lingkungan strategis Prancis dan Eropa semakin menjadi prioritas (perbatasan timur Uni Eropa, Mediterania Timur dan Selatan, ruang siber) dan akan mendapat perhatian besar dalam Tinjauan Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional yang sedang disusun ulang (Macron, 2021). Barkhane menimbulkan biaya finansial yang signifikan (€695 juta pada tahun 2019, dan

mendekati €1 miliar pada tahun 2020), yang setara dengan 76 persen dari pengeluaran negara untuk misi dan operasi militernya di dalam dan luar negeri. Di tengah tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, biaya-biaya ini mungkin akan semakin sulit dipertahankan untuk sebuah operasi yang sejak lama disikapi dengan ketidakpedulian publik di dalam negeri, meskipun masyarakat menganggap serangan teroris sebagai ancaman besar terhadap keamanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Prancis belum tentu yakin bahwa terorisme yang berbasis di Sahel merupakan ancaman besar bagi Prancis (Macron, 2021).

Faktor External

A. Gelombang Sentimen Anti-Prancis

Terdapat tuduhan bahwa Prancis gagal memberantas kelompok militan dan teroris secara efektif, yang membuat masyarakat sipil memandang kehadiran Prancis hanya sebagai upaya untuk melanggengkan hegemoni kolonial. Aksi protes publik secara masif sering kali melibatkan pengibaran bendera Rusia. Protes besar-besaran tersebut semakin memperburuk lingkungan strategis: Prancis menginvestasikan sumber daya yang sangat besar tetapi memperoleh hasil yang semakin berkurang, sementara mitra lokalnya digulingkan, tidak dapat diandalkan, atau secara terbuka bersikap bermusuhan. Muncul konsensus di Paris bahwa misi 'Barkhane', sebagaimana awalnya dirancang, telah mencapai batas kemampuannya. Misi di Sahel menimbulkan biaya yang tinggi, baik dalam hal nyawa maupun keuangan. Selama bertahun-tahun, puluhan tentara Prancis kehilangan nyawa mereka, dan beban finansial untuk mempertahankan ribuan pasukan di luar negeri—beserta peralatan canggih dan dukungan logistik meningkat hingga mencapai ratusan juta euro setiap tahun. Pada awalnya, opini publik Prancis mendukung pada tahun 2013; namun, pada tahun 2021, mayoritas warga memandang intervensi tersebut sebagai beban yang sia-sia (Macron, 2021)..

B. Masuknya Pengaruh China dan Rusia

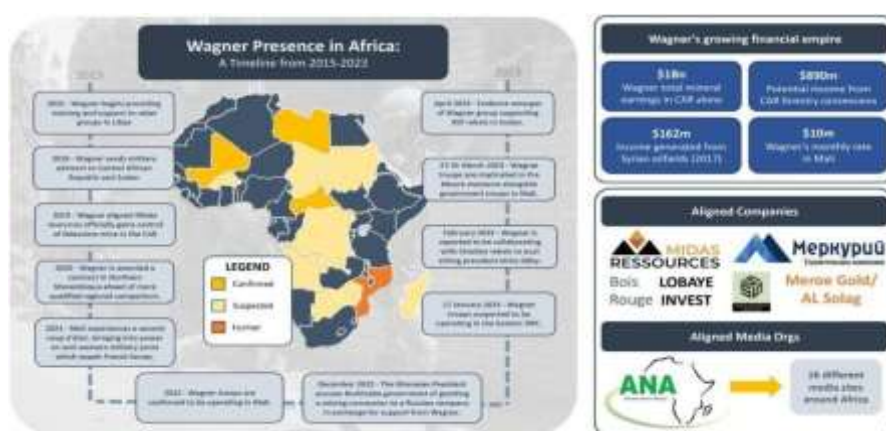
Perubahan aliansi regional dan semakin besarnya jejak kekuatan-kekuatan lain juga sangat memengaruhi pengurangan kehadiran Prancis. Dalam kekosongan yang ditinggalkan oleh pasukan Prancis yang hengkang, Rusia dengan antusias masuk sebagai mitra bagi rezim-rezim Sahel yang sedang menghadapi tekanan. Kelompok 'Africa Corps', yang sebelumnya dikenal sebagai Wagner Group, sebuah perusahaan militer swasta yang terkait dengan Kremlin, mengerahkan tentara bayaran ke Mali segera setelah kepergian Prancis. Kontraktor Africa Corps kini membantu angkatan

bersenjata Mali, dan tanda-tanda kehadiran Rusia yang serupa telah diamati di Republik Afrika Tengah dan, menurut laporan, di Burkina Faso pada akhir 2023. Hingga tahun 2025, keberadaan Wagner Group telah dikonfirmasi di Burkina Faso, Republik Afrika Tengah, Niger, Mali, dan Sudan (Repetowicz., 2023).

Kehadiran Rusia di Sahel terutama berbentuk kerja sama militer resmi maupun tidak resmi, termasuk ekspor senjata, pasokan peralatan militer, dan pengerahan pasukan. Meskipun keterlibatan Rusia di Sahel sudah ada sebelum kedatangan pasukan Wagner di Mali pada tahun 2021, justru pengerahan merekalah yang menandai titik awal penyelarasan strategis kembali negara-negara AES dan menjadi katalis bagi keterlibatan Rusia yang lebih luas di kawasan tersebut. Dikombinasikan dengan kampanye disinformasi yang strategis dan efektif, Rusia mampu memberikan pengaruh yang jauh lebih besar daripada bobot kekuatannya di Sahel (Repetowicz., 2023).

Gambar 4.6

Peta Aktivitas Wagner group di Kawasan Sahel



Sumber: <https://www.inonafrica.com/2023/07/07/more-than-mere-mercenaries-the-wagner-group-in-africa/>

Di Mali, pasukan Wagner yang keberadaannya tidak pernah secara resmi diakui oleh otoritas transisi, namun secara agak ironis dikonfirmasi oleh pejabat Rusia telah secara aktif berpartisipasi dalam operasi tempur

melawan kelompok jihad dan kelompok separatis bersenjata sejak kedatangan mereka. Menariknya, bendera hitam Wagner adalah yang pertama dikibarkan—meskipun segera diturunkan kembali—ketika tentara Mali bersama pasukan Rusia merebut kota Kidal di utara yang memiliki nilai simbolis penting dari kendali kelompok separatis. Walaupun keberadaan dan aktivitas pasukan Wagner relatif jelas di Mali, hal tersebut jauh kurang terlihat di Niger dan Burkina Faso. Beberapa ratus tentara Rusia, yang dikerahkan di bawah panji Africa Corps penerus kelompok Wagner tiba di kedua

negara tersebut pada musim dingin dan musim semi tahun 2024, namun sejauh ini mereka tampaknya tidak ikut serta dalam operasi melawan kelompok jihad. Di Mali, transisi dari pasukan Wagner ke Africa Corps dilaporkan sedang berlangsung, tetapi prosesnya lambat dan informasi yang terverifikasi mengenai hal itu masih sangat terbatas (Repetowicz., 2023).

Tiongkok: Berinvestasi dalam Sumber Daya Alam Strategis

Kehadiran Tiongkok di kawasan Sahel mencerminkan jejaknya yang lebih luas di benua Afrika: pengaruh yang stabil dan terus berkembang terutama dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam, melalui keterlibatan utama seperti investasi di sektor minyak dan pertambangan.

Di Niger, sebuah perusahaan minyak nasional Tiongkok mengembangkan ladang minyak Agadem dan, sejak 2019, membangun pipa sepanjang 2.000 km dari Niger ke Benin untuk ekspor minyak. Proyek senilai 6 miliar dolar AS ini merupakan pipa terpanjang di benua tersebut dan pada awalnya diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan Niger yang memburuk setelah kudeta. Namun, sejak 2024, ketika 200.000 barel per hari pertama yang diharapkan akan diekspor melalui pelabuhan Cotonou, proyek tersebut menghadapi berbagai tantangan (Julio, 2025).

4. KESIMPULAN

Barkhane merupakan operasi luar negeri prioritas tinggi bagi Republik Prancis, yang mengakui bahwa satu-satunya kesempatan untuk melawan terorisme internasional adalah melalui kehadiran militer di Afrika Barat. Optimisme yang ditunjukkan Paris setelah keberhasilan Operasi Serval, yang kemudian berubah menjadi Barkhane, terbukti terlalu dini.

Keputusan untuk menarik diri dari Mali dan kemudian dari kawasan tersebut sebuah langkah yang pada dasarnya dipaksa dilakukan oleh Prancis memiliki sejumlah implikasi bagi keterlibatan internasional di kawasan ini. Pertama-tama, masa depan Task Force Takuba menjadi tidak pasti, karena hampir separuh personel yang terlibat adalah warga Prancis. Ketidakhadiran mereka akan sangat melemahkan seluruh kontingen internasional. Pada akhir 2022, aktivitas militer Prancis di Mali dan Burkina Faso dihentikan, dan di Niger situasinya menjadi tegang.

Perlu ditekankan bahwa Prancis masih bermaksud memberikan dukungan udara dan medis kepada misi PBB maupun Uni Eropa. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa keputusan Élysée Palace sedang diawasi oleh negara-negara lain dan mereka mungkin menjadikan langkah mereka sendiri bergantung pada keputusan berikutnya mengenai penarikan pasukan dan meninggalkan Sahel. Hal ini akan sangat berbahaya bagi Eropa yang tidak siap menghadapi gelombang migrasi baru, serta ancaman terorisme internasional. Selain itu, seluruh

investasi Eropa di Afrika akan terdampak. Meskipun dianggap tidak efektif, Prancis telah mempertahankan situasi yang relatif aman di kawasan Sahel.

Di masa depan, jika ada misi yang beroperasi di Sahel, Prancis akan mengandalkan dukungan dari mitra sekutu lainnya. Ini berarti beban pengamanan di kawasan Sahel akan dibagi dengan negara lain, mungkin juga dengan Polandia. Jika negara-negara Eropa tidak terlibat di Afrika, maka Federasi Rusia dan kelompok tentara bayaran seperti Wagner Group,³⁴ akan terlibat dan menghambat kerja sama apa pun dengan Eropa. Kawasan Sahel sangat penting karena merupakan zona transit antara wilayah Maghreb dan Sub-Sahara Afrika. Pasukan militer Prancis akan berusaha mendapatkan kembali posisinya di Sahel, tetapi hal itu akan sangat mahal. Terutama, semakin besar keterlibatan Prancis di Afrika, semakin kecil keterlibatannya di Eropa Timur. Jika ada yang mengharapkan dukungan dari Prancis di Eropa, maka mereka juga harus lebih berkomitmen untuk bekerja sama dengan Prancis di tempat yang diperlukan.

REFERENSI

D.M. Tull, "Operation Barkhane and the Future of Intervention in the Sahel," SWP

comment, no. 5 (January, 2021): 3, 4

Demmers, J. (2017). *Theories of Violent Conflict*. London & New York: Routledge

Guichaoua, Y. (2020). The bitter harvest of French interventionism in the Sahel.

International Affairs, 96(4), P.895-911

Hanne, O. (2016). Barkhane : succès, atouts et limites d'une operation original dans la Bande sahélo-saharienne. *Res Militaris*, P.1-18

Wing, D. S. (2016). French intervention in Mali: strategic alliances, long-term

regional presence? *Small Wars & Insurgencies*, 27(1), P.59-80 D.M. Tull,

"Operation Barkhane and the Future of Intervention in the Sahel," SWP

comment, no. 5 (January, 2021): 3, 4

Demmers, J. (2017). *Theories of Violent Conflict*. London & New York: Routledge

Guichaoua, Y. (2020). The bitter harvest of French interventionism in the Sahel.

International Affairs, 96(4), P.895-911

Hanne, O. (2016). Barkhane : succès, atouts et limites d'une operation original

- dans la Bande sahélo-saharienne. *Res Militaris*, P.1-18
- Wing, D. S. (2016). French intervention in Mali: strategic alliances, long-term regional presence? *Small Wars & Insurgencies*, 27(1), P.59-80
- Charbonneau, B. (2017). De Serval à Barkhane: les problèmes de la guerre contre le terrorisme au Sahel. *Les Temps modernes*, P.322-340
- Charbonneau, B. (2019). Intervention as counter-insurgency politics. *Conflict, Security & Development*, 19(3), 309-314
- Charbonneau, B. & Sears, J. M. (2014). Fighting for Liberal Peace in Mali? The Limits of International Military Intervention. *Journal of Intervention and Statebuilding*, 8(2-3), 192- 213
- Macron, E. (2020, 12 Februari). Tanya Jawab dari konferensi pers [Transkrip]. Diperolehdari <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/mali/news/article/mali-qa-from-the-press-pengarahan-12-feb-2021>
- W. Repetowicz, “Ekspansja Rosji w Sahelu: Polska powinna wesprzeć Francję,” accessed July 15, 2023, <https://www.defence24.pl/ekspansja-rosji-w-sahelu-polska-powinna-wesprzec-francje-opinia>
- S. Petite, “Au Sahel, négocier avec les djihadistes n’est plus tabou,” *Le Temps*, February 7, 2021, accessed July 12, 2023, <https://www.letemps.ch/monde/sahel-negocier-djihadistes-nest-plus-tabou>